



ISSN 2963-1602

Volume 4 Nomor 01, Bulan Juni Tahun 2025

Jurnal Ilmiah Koordinasi

Dikirim penulis: 15-06-2025, Diterima: 29-06-2025 Dipublikasi: 28-07-2025

EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MENGGUNAKAN MODEL CIPP (*CONTEXT, INPUT, PROCESS, PRODUCT*) DI KECAMATAN PURBARATU KOTA TASIKMALAYA

Adang Rahmat Sudrajat
Program Magister Ilmu Administrasi
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YPPT Priatim Tasikmalaya
Email: adangrahmats@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya dengan menggunakan Model CIPP (Context, Input, Process, Product). Program ini merupakan program pemerintah untuk mendukung percepatan pembangunan di wilayah kelurahan. Permasalahan utama dalam program ini meliputi pembatasan alokasi anggaran antara kegiatan fisik dan pemberdayaan, kurang optimalnya sumber daya manusia pelaksana, serta tidak adanya sistem pemeliharaan hasil pembangunan yang berdampak pada berkurangnya manfaat jangka panjang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif evaluatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model evaluasi CIPP yang mengkaji aspek konteks, input, proses, dan produk dari pelaksanaan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek konteks, program ini memiliki dasar hukum dan kebutuhan yang kuat, namun terbentur pada rigiditas alokasi anggaran. Dari aspek input, struktur kelembagaan tersedia namun kualitas SDM belum optimal. Dari aspek proses, prosedur pelaksanaan telah mengikuti aturan formal namun masih menghadapi kendala koordinasi dan partisipasi masyarakat yang rendah. Dari aspek produk, capaian kuantitatif tergolong tinggi, namun kualitas hasil pembangunan dan keberlanjutan manfaat masih belum maksimal karena kurangnya perencanaan pemeliharaan dan lemahnya dampak pemberdayaan masyarakat. Kesimpulannya, meskipun program menunjukkan komitmen pemerintah dalam pembangunan berbasis kelurahan, masih terdapat kesenjangan antara perencanaan dan implementasi di lapangan. Diperlukan perbaikan menyeluruh dari sisi kebijakan, penguatan kapasitas pelaksana, serta integrasi program dalam pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.

Kata kunci: Evaluasi Program, Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya.

ABSTRACT

This study aims to evaluate the development program of kelurahan facilities and infrastructure as well as community empowerment in Purbaratu District, Tasikmalaya City using the CIPP (Context, Input, Process, Product) models. This program is a government program to support the acceleration of development in the village area. The main problems in

this program include restrictions on budget allocation between physical activities and empowerment, less optimal human resources implementing, as well as the absence of a system of maintenance of development results that have an impact on the reduced long-term benefits. This study uses a qualitative approach with evaluative descriptive methods. Data collection techniques are carried out through literature studies, in-depth interviews, observation, and documentation. Data analysis is carried out using the CIPP evaluation model that examines the context, input, process, and product aspects of program implementation. The results showed that from the context aspect, this program has a strong legal basis and needs, but collided with the rigidity of budget allocation. From the input aspect, the institutional structure is available but the quality of HR is not optimal. From the aspect of the process, the implementation procedure has followed formal rules but still faces low community coordination and participation constraints. From the aspect of the product, quantitative achievements are relatively high, but the quality of the results of development and sustainability of benefits is still not optimal due to lack of maintenance planning and weak impact of community empowerment. In conclusion, although the program shows the government's commitment in village-based development, there is still a gap between planning and implementation in the field. Comprehensive improvements are needed in terms of policy, strengthening implementing capacity, and program integration in sustainable long-term development.

Keywords: Program Evaluation, Development of Village Facilities and Infrastructure and Empowerment of Kelurahan Community in Purbaratu District, Tasikmalaya City.

PENDAHULUAN

Kecamatan Purbaratu merupakan salah satu kecamatan di Kota Tasikmalaya hasil pemekaran dari Kecamatan Cibereum yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Bungursari dan Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya secara administratif wilayahnya terdiri dari 6 Kelurahan, yaitu : Kelurahan Purbaratu, Kelurahan Sukanagara, Kelurahan Sukamenak, Kelurahan Sukaasih, Kelurahan Sukajaya, dan Kelurahan Singkup.

Pemerintah membuat kebijakan berkaitan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagai upaya untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri. Kebijakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan tertuang dalam Pasal 230 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, dan diatur lebih teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Berbagai kendala masih dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Tantangan yang sering muncul di antaranya adalah keterbatasan anggaran, keterbatasan partisipasi masyarakat, hingga

lemahnya koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat setempat. Selain itu, sering terjadi ketidakcocokan antara hasil yang diharapkan dengan implementasi di lapangan. Misalnya, kualitas infrastruktur yang dibangun tidak selalu sesuai dengan standar yang diinginkan, atau kegiatan pemberdayaan masyarakat yang gagal mencapai target sasaran karena minimnya keterlibatan masyarakat.

Evaluasi terhadap proram kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan menjadi sangat penting dalam mengidentifikasi berbagai masalah yang muncul dan memastikan bahwa tujuan kegiatan dapat tercapai. Evaluasi ini juga diperlukan untuk memberikan umpan balik kepada Pemerintah Daerah. Berdasarkan evaluasi ini, pemerintah dapat memperbaiki kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan ke depan agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi lokal.

Di sisi lain, penting untuk memahami sejauh mana kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat kelurahan mampu menciptakan perubahan signifikan di Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya. Adanya program pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat kelurahan seharusnya tidak hanya sekedar formalitas administratif, tetapi benar-benar berdampak positif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sehingga evaluasi yang komprehensif terhadap pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk menyusun rekomendasi perbaikan bagi keberlanjutan pembangunan di Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya, penulis menfokuskan pada penelitian Evaluasi Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Menggunakan Model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) Di Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya, khususnya fenomena yang terlihat pada Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya.

Evaluasi adalah bagian dari suatu penelitian. Evaluasi merupakan proses pengumpulan data untuk menentukan sejauhmana, dalam hal apa, dan bagaimana tujuan program dapat tercapai. Evaluasi merupakan alat untuk menganalisis dan menilai fenomena dan aplikasi ilmu pengetahuan. Evaluasi program adalah proses yang sistematis untuk menilai suatu program, termasuk tujuan, implementasi, dan hasilnya. Tujuan evaluasi program adalah untuk mengetahui sejauh mana program berhasil dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program agar dapat ditingkatkan atau diperbaiki.

Menurut Anderson dalam Winarno (2008: 166), "secara umum evaluasi dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut". Sementara Stutflebeam dalam Arikunto dan Jabar (2010:2) mengatakan bahwa, "evaluasi merupakan penggambaran proses, mencari dan memberikan informasi yang berguna untuk para pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan".

Dari pengertian evaluasi diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah proses kegiatan pengukuran, menilai, menganalisis terhadap program atau kebijakan untuk menentukan hasil dari tujuan yang telah ditetapkan, sebagai pedoman pengambilan langkah dimasa yang akan datang. Adapun tujuan utama evaluasi program adalah untuk menilai efektivitas dan efisiensi program, memberikan masukan untuk perbaikan, dan membantu

pengambilan keputusan yang lebih baik. Evaluasi juga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas program, menunjukkan akuntabilitas, dan memastikan penggunaan sumber daya yang tepat.

Menurut Mulyatiningsih (2011: 114-115), evaluasi program dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- (a) Menunjukkan sumbangan program terhadap pencapaian tujuan suatu organisasi. Hasil evaluasi ini penting untuk pengembangan program yang sama ditempat lain.
- (b) Mengambil keputusan mengenai keberlanjutan sebuah program, apakah program perlu diteruskan, diperbaiki atau dihentikan.

Dilihat dari tujuannya, yaitu ingin mengetahui sesuatu kondisi, maka evaluasi program dapat dikatakan merupakan salah satu bentuk penelitian evaluatif, sehingga dalam suatu evaluasi program, pelaksana berfikir serta menentukan langkah bagaimana melaksanakan penelitian. Adapun Evaluasi program bermanfaat untuk mengukur efektivitas program, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, dan memberikan masukan untuk perbaikan program di masa mendatang. Evaluasi juga membantu dalam pengambilan keputusan mengenai keberlanjutan atau modifikasi program.

Kegiatan evaluasi sangat berguna bagi pengambilan keputusan dan kebijakan lanjutan dari program, karena dari masukan hasil evaluasi program itulah para pengambil keputusan akan menentukan tidak lanjut dari program yang sedang atau telah dilaksanakan. Wujud dari hasil evaluasi adalah sebuah rekomendasi dari peneliti untuk pengambil keputusan (*decision maker*). Suharsimi Arikunto (2012: 22) mengatakan bahwa ada empat kemungkinan kebijakan yang dapat dilakukan berdasarkan hasil dalam pelaksanaan sebuah program keputusan, yaitu: (a) Menghentikan program, karena dipandang bahwa program tersebut tidak ada manfaatnya, atau tidak dapat terlaksana sebagaimana diharapkan. (b) Merevisi program, karena ada bagian-bagian yang kurang sesuai dengan harapan (terdapat kesalahan tetapi hanya sedikit). (c) Melanjutkan program; pelaksanaan program menunjukkan bahwa segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan harapan dan memberikan hasil yang bermanfaat. (d) Desimilasi atau menyebarkan program (melaksanakan program di tempat-tempat lain atau mengulangi lagi program di waktu lain), karena program tersebut berhasil dengan baik maka sangat baik jika dilaksanakan lagi di tempat dan waktu yang lain.

Terdapat beberapa langkah-langkah evaluasi program umumnya meliputi perencanaan, pengumpulan data, analisis data, dan pelaporan. Evaluasi program adalah proses yang sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang suatu program dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi program tersebut. Langkah-langkah evaluasi program menurut Oemar Hamalik (2008: 13) adalah sebagai berikut: a) Menyusun suatu rencana evaluasi dalam bentuk kisi-kisi apa yang akan dinilai berkaitan dengan tujuan program. b) Menyusun instrumen evaluasi, misalnya. skala, daftar rentang, pedoman observasi/ kuesioner, pedoman wawancara, pedoman dokumentasi. c) Melaksanakan pengamatan lapangan, yaitu mengumpulkan data dari responden atau sampel evaluasi. d) Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, selanjutnya dapat ditentukan tingkat keberhasilan program, kelemahan-kelemahan atau kendala-kendala untuk diperbaiki. e) Mengajukan sejumlah rekomendasi terhadap program yang telah dievaluasi tersebut. f) Menyusun laporan evaluasi dan menyebarkan hasil evaluasi kepada pihak yang berkepentingan.

Model evaluasi program adalah kerangka kerja atau pendekatan yang digunakan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak program. Model-model ini membantu dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Beberapa model yang umum digunakan antara lain model CIPP, model Discrepancy, model Formatif-Sumatif, dan model Responsive.

Model-model evaluasi yang satu dengan yang lainnya memang tampak bervariasi, akan tetapi maksud dan tujuannya sama yaitu melakukan kegiatan pengumpulan data atau informasi yang berkenaan dengan objek yang dievaluasi. Selanjutnya informasi yang telah terkumpul dapat diberikan kepada pengambil keputusan supaya dapat dengan tepat menentukan tindak lanjut mengenai program yang telah dievaluasi.

Menurut Kaufman dan Thomas yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar (2009: 40), salah satu modelnya, yaitu:

CIPP didirikan pada pendekatan konstruktivis yang mengharuskan evaluator untuk beroperasi atas dasar kepercayaan, menunjukkan rasa hormat kepada semua pemangku kepentingan, terlepas dari kekuasaan, jenis kelamin, dan latar belakang budaya (Stufflebeam dan Shinkfield 2007). CIPP menggunakan empat konsep utama untuk evaluasi, yaitu suatu panduan berupa evaluasi konteks, evaluasi masukan, evaluasi proses dan evaluasi produk. Masing-masing komponen CIPP berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan khusus dalam tahapan dalam proses dievaluasi Wardi Dan Elisa, (2023). Pemilihan model evaluasi yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa evaluasi dilakukan dengan benar dan hasil evaluasi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas sistem atau program yang dievaluasi. Model Evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) adalah salah satu model evaluasi yang paling sering digunakan dalam evaluasi program. Model ini dikembangkan oleh Stufflebeam dan Shinkfield pada tahun 1985 dan telah mengalami beberapa revisi sejak saat itu. Model ini terdiri dari empat komponen utama, yaitu konteks, input, proses, dan produk.

Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan adalah proses pembangunan fisik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah kelurahan. Ini meliputi pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, fasilitas air bersih, drainase, dan fasilitas umum lainnya dan Pemberdayaan masyarakat kelurahan adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan, pengambilan keputusan, dan pengelolaan sumber daya di wilayahnya (Perwal Kota Tasikmalaya No. 40 Tahun 2022).

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian (*research approach*) merupakan rencana dan prosedur penelitian yang meliputi asumsi-asumsi luar hingga metode-metode terperinci dalam pengumpulan, analisis dan interpretasi data (Creswell, 2019). Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah dengan pendekatan kualitatif. Nazir memaknai pendekatan kualitatif sebagai suatu studi untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat.

Sugiyono menjelaskan bahwa metode kualitatif disebut sebagai metode interpretasi karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan (Sugiyono, 2013). Metode yang digunakan peneliti adalah metode deskriptif yaitu metodologi yang bertujuan membuat deskripsi yang akurat, faktual dan sistematis pada fakta tertentu. Dengan metode ini, peneliti akan mendeskripsikan bagaimana Evaluasi Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Menggunakan

Model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) Di Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya melalui data-data yang dikumpulkan di lapangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Evaluasi program pembangunan di Kecamatan Purbaratu menggunakan model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) adalah pendekatan yang komprehensif untuk menilai efektivitas program. Dalam konteks ini, evaluasi konteks berfokus pada analisis kebutuhan dan masalah yang melatarbelakangi program, seperti kondisi sarana dan prasarana kelurahan serta tingkat pemberdayaan masyarakat di Purbaratu. Evaluasi input menyoroti sumber daya yang digunakan, mulai dari anggaran, personel, hingga kebijakan yang diterapkan untuk menjalankan program. Sementara itu, evaluasi proses mengkaji implementasi program secara langsung, termasuk kegiatan yang dilakukan, partisipasi masyarakat, serta kendala yang dihadapi. Evaluasi produk menjadi tahap akhir yang mengukur hasil dan dampak dari program, baik yang berjangka pendek maupun panjang, seperti peningkatan kualitas sarana, peningkatan kapasitas masyarakat, dan perubahan sosial yang terjadi.

Dengan menerapkan model CIPP, evaluasi program pembangunan di Kecamatan Purbaratu tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga melihat seluruh siklus program dari awal hingga akhir. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi kelemahan di setiap tahapan, mulai dari perencanaan yang kurang tepat, alokasi sumber daya yang tidak efisien, hingga pelaksanaan yang tidak optimal. Hasil evaluasi ini sangat bermanfaat bagi pemerintah kota dan pemangku kepentingan lainnya untuk membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. Misalnya, mereka dapat memperbaiki perencanaan program, mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif, dan menyusun strategi pemberdayaan masyarakat yang lebih tepat sasaran, sehingga program pembangunan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi warga Kecamatan Purbaratu.

1. Evaluasi Konteks (*Context Evaluation*)

Evaluasi konteks adalah langkah awal untuk memahami program secara keseluruhan, mulai dari alasan di balik pembentukannya, hingga tujuan yang ingin dicapai. Dalam kasus program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ini, evaluasi menunjukkan bahwa program tersebut adalah implementasi dari UU No. 23 Tahun 2014 dan Permendagri No. 130 Tahun 2018, yang berarti secara kebijakan program ini sudah relevan dan memiliki dasar hukum yang kuat. Tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat.

Namun, meskipun program ini memiliki landasan yang jelas dan tujuan yang mulia, terdapat masalah fundamental yang menghambat pelaksanaannya, yaitu keterbatasan anggaran. Anggaran yang ada harus dibagi untuk dua kegiatan utama yang berbeda, yaitu pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Kondisi ini secara langsung menimbulkan ketidakseimbangan prioritas di lapangan, karena kebutuhan untuk pembangunan infrastruktur sering kali dianggap lebih mendesak dan mudah diukur dibandingkan kegiatan pemberdayaan yang dampaknya tidak langsung terlihat.

Dapat disimpulkan bahwa program ini menghadapi dilema antara tujuan yang ideal dengan realitas fiskal yang ada. Tanpa dukungan finansial yang memadai, respons kelurahan terhadap kebutuhan lokal menjadi tidak optimal. Situasi ini menunjukkan bahwa kebijakan yang baik saja tidak cukup untuk menjamin keberhasilan. Dibutuhkan alokasi

anggaran yang lebih proporsional agar kedua kegiatan—pembangunan dan pemberdayaan dapat berjalan seimbang dan mencapai tujuannya masing-masing.

Keterbatasan anggaran ini tidak hanya sekadar masalah teknis, tetapi juga cerminan dari tantangan struktural yang lebih besar. Pemerintah daerah perlu mengevaluasi kembali bagaimana alokasi dana dapat lebih efektif dan efisien. Jika tidak ada perbaikan dalam aspek ini, program akan terus berhadapan dengan masalah prioritas yang bertentangan dan hasil yang tidak maksimal. Solusi jangka panjangnya adalah meninjau ulang model pendanaan atau mencari sumber dana tambahan untuk memastikan kedua pilar program ini dapat berjalan beriringan.

2. Evaluasi Input (Input Evaluation)

Evaluasi input berfokus pada sumber daya yang digunakan untuk menjalankan program, seperti sumber daya manusia (SDM), dana, dan peralatan. Dalam evaluasi program pembangunan dan pemberdayaan ini, ditemukan bahwa kualitas sumber daya manusia menjadi kendala utama. Secara spesifik, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Kelompok Masyarakat yang terlibat memiliki keterbatasan dalam kompetensi teknis. Meskipun telah ditunjuk tenaga pendamping secara formal, pendampingan yang diberikan tidak selalu optimal, sehingga tidak mampu menutupi kesenjangan kompetensi yang ada.

Kurangnya pemahaman teknis ini berdampak besar pada efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program. Misalnya, PPTK yang tidak memiliki pengetahuan teknis yang memadai akan kesulitan dalam membuat perencanaan yang rinci dan mengawasi pekerjaan di lapangan dengan baik. Demikian pula, kelompok masyarakat yang tidak dibekali dengan keterampilan yang cukup akan pasif dalam proses pengambilan keputusan dan tidak mampu mengidentifikasi solusi inovatif dalam penggunaan dana. Hal ini membuat mereka menjadi penerima manfaat pasif alih-alih menjadi agen perubahan yang aktif.

Kualitas pelaksanaan program sangat ditentukan oleh kualitas SDM. Rendahnya kompetensi teknis tidak hanya menghambat jalannya kegiatan, tetapi juga membatasi inisiatif untuk berinovasi dan mencari cara-cara baru yang lebih efektif dalam menggunakan anggaran yang terbatas. Jika kompetensi SDM tidak ditingkatkan, program akan terjebak dalam pola kerja yang sama dan tidak mampu beradaptasi dengan tantangan yang muncul.

Secara keseluruhan, evaluasi input menyoroti pentingnya investasi pada sumber daya manusia. Untuk memperbaiki kondisi ini, perlu dilakukan pelatihan dan pendampingan yang lebih intensif dan terstruktur. Pelatihan tidak hanya harus fokus pada aspek teknis, tetapi juga pada pengembangan kemampuan manajerial dan kepemimpinan. Dengan SDM yang kompeten, program akan lebih efisien, efektif, dan mampu menghasilkan dampak yang lebih signifikan.

3. Evaluasi Proses (Process Evaluation)

Evaluasi proses mengkaji bagaimana program dijalankan di lapangan, mulai dari implementasi kegiatan hingga koordinasi antarpihak yang terlibat. Meskipun struktur tim pelaksana telah ditetapkan secara formal dan lengkap, evaluasi ini menemukan bahwa pelaksanaan kegiatan sering tidak berjalan maksimal. Beberapa masalah utama yang teridentifikasi adalah kegiatan yang tidak berjalan sesuai jadwal, kurangnya monitoring dan evaluasi internal, dan sosialisasi yang belum merata kepada masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai jadwal dan minimnya monitoring menunjukkan adanya kelemahan dalam manajemen operasional. Kondisi ini membuat

program menjadi terlalu birokratis dan lambat. Alur kerja yang kaku dan minimnya pengawasan membuat tim pelaksana sulit untuk bereaksi cepat terhadap masalah yang muncul. Akibatnya, kegiatan menjadi tumpang tindih dan sering kali terhenti tanpa solusi yang jelas, sehingga menghambat capaian target secara keseluruhan.

Selain itu, minimnya partisipasi aktif dari warga juga menjadi masalah serius dalam evaluasi proses. Meskipun ada proses musyawarah, seringkali keputusan yang diambil tidak sepenuhnya melibatkan masyarakat, terutama dalam kegiatan pemberdayaan. Hal ini membuat program berjalan satu arah, di mana masyarakat hanya menjadi objek, bukan subjek pembangunan. Kurangnya partisipasi ini dapat mengurangi rasa kepemilikan masyarakat terhadap program, yang pada akhirnya memengaruhi keberlanjutan dan dampaknya.

Dapat disimpulkan bahwa meskipun struktur formal ada, koordinasi dan mekanisme kerja di dalamnya tidak berjalan efektif. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan perbaikan dalam sistem manajemen, termasuk penguatan fungsi monitoring dan evaluasi internal secara berkala. Selain itu, partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan melalui forum musyawarah yang lebih inklusif dan representatif, memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga.

4. Evaluasi Produk (Product Evaluation)

Evaluasi produk berfokus pada hasil akhir dari program, termasuk dampak dan keberlanjutannya. Dari evaluasi ini, ditemukan bahwa secara kuantitatif, program ini berhasil mencapai target pembangunan fisik yang tinggi, yaitu rata-rata 97,21%. Angka ini menunjukkan bahwa dari sisi pembangunan infrastruktur, program ini terlihat sukses. Namun, keberhasilan ini tidak serta merta menjadi indikator kesuksesan jangka panjang.

Masalah utama yang ditemukan adalah tidak adanya rencana pemeliharaan yang jelas untuk infrastruktur yang sudah dibangun. Akibatnya, hasil pembangunan, terutama infrastruktur kecil seperti jalan lingkungan dan saluran air, cenderung cepat rusak. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian fisik yang tinggi hanyalah keberhasilan sesaat. Tanpa adanya mekanisme pemeliharaan, manfaat dari pembangunan tersebut tidak dapat dirasakan oleh masyarakat dalam jangka waktu yang lama, sehingga program menjadi kurang berkelanjutan.

Selain itu, evaluasi produk juga menyoroti kelemahan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini dinilai tidak berdampak besar pada perubahan sosial karena kurang terintegrasi dengan kebutuhan nyata masyarakat. Misalnya, pelatihan yang diberikan mungkin tidak relevan dengan mata pencarian warga, sehingga tidak memberikan nilai tambah yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan masih bersifat seremonial dan belum mampu menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, evaluasi produk memberikan kesimpulan penting bahwa pencapaian fisik bukanlah satu-satunya ukuran keberhasilan. Untuk dianggap berhasil, program harus mampu menghasilkan dampak yang berkelanjutan dan menciptakan perubahan positif dalam kehidupan masyarakat, sehingga perlu adanya perbaikan dalam perencanaan, yaitu dengan memasukkan aspek pemeliharaan sebagai bagian integral dari program. Selain itu, program pemberdayaan perlu didesain ulang agar lebih responsif terhadap kebutuhan dan potensi lokal, sehingga dapat memberikan dampak sosial yang lebih signifikan dan berkelanjutan.



ISSN 2963-1602

Volume 4 Nomor 01, Bulan Juni Tahun 2025

Jurnal Ilmiah Koordinasi

Dikirim penulis: 15-06-2025, Diterima: 29-06-2025 Dipublikasi: 28-07-2025

Berdasarkan penelitian ini bahwa program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ini memiliki landasan kebijakan yang kuat, namun menghadapi tantangan serius dari segi keterbatasan anggaran. Anggaran yang ada tidak memadai dan harus dibagi antara pembangunan fisik dan pemberdayaan, sehingga menciptakan ketidakseimbangan prioritas. Pembangunan infrastruktur cenderung diutamakan karena dianggap lebih mendesak dan hasilnya mudah diukur, sementara kegiatan pemberdayaan sering kali terabaikan. Akibatnya, program ini menghadapi dilema antara tujuan ideal dan realitas finansial, yang berpotensi menghambat respons kelurahan terhadap kebutuhan lokal dan pencapaian tujuan secara keseluruhan.

Pelaksanaan program ini juga terhambat oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) yang rendah dan kelemahan dalam proses manajemen. Kompetensi teknis para pelaksana, seperti Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Kelompok Masyarakat, masih terbatas. Meskipun ada tenaga pendamping, pendampingan yang diberikan tidak optimal, menyebabkan perencanaan dan pengawasan di lapangan kurang efektif. Selain itu, proses kerja di lapangan berjalan terlalu birokratis dan lambat. Koordinasi yang tidak efektif, kurangnya monitoring internal, dan sosialisasi yang tidak merata membuat pelaksanaan kegiatan tidak sesuai jadwal dan minimnya partisipasi aktif masyarakat. Hal ini membuat program berjalan satu arah, di mana masyarakat hanya menjadi objek, bukan subjek pembangunan.

Meskipun secara kuantitatif program ini berhasil mencapai target pembangunan fisik, keberhasilannya tidak berkelanjutan dan dampak pemberdayaannya masih lemah. Infrastruktur yang dibangun tidak memiliki rencana pemeliharaan yang jelas, sehingga cepat rusak. Sementara itu, kegiatan pemberdayaan masyarakat dinilai tidak memberikan dampak besar karena tidak relevan dengan kebutuhan nyata warga. Pencapaian fisik yang tinggi hanya menjadi keberhasilan sesaat, tanpa ada perubahan sosial yang signifikan dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, program ini membutuhkan perbaikan dalam perencanaan, pendanaan, serta peningkatan kualitas SDM dan partisipasi masyarakat agar dapat menghasilkan dampak positif jangka panjang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi dengan model CIPP (Context, Input, Process, Product), dapat disimpulkan bahwa Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, telah dilaksanakan sesuai dengan kerangka regulasi yang ada. Program ini memiliki landasan hukum yang kuat dan didukung oleh struktur kelembagaan yang lengkap serta alokasi anggaran yang seragam. Namun, implementasi program masih menghadapi berbagai tantangan. Masalah utama terletak pada keterbatasan anggaran, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum optimal, dan kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Hal-hal tersebut menyebabkan program ini kurang efektif dan tidak sepenuhnya mencapai tujuan yang diharapkan.

Secara keseluruhan, meskipun capaian fisik program cukup tinggi dengan penyerapan anggaran yang memuaskan, manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat masih belum maksimal. Kegiatan pembangunan fisik sering kali tidak bertahan lama karena tidak adanya sistem pemeliharaan yang memadai, sementara kegiatan pemberdayaan masyarakat dinilai kurang berdampak pada perubahan sosial dan peningkatan ekonomi. Evaluasi ini menyoroti adanya kesenjangan antara perencanaan yang ideal dengan kenyataan di lapangan. Untuk

meningkatkan efektivitas program, diperlukan perbaikan menyeluruh seperti meningkatkan sosialisasi, memperbaiki mekanisme komunikasi, mengevaluasi kembali alokasi anggaran, serta meningkatkan kualitas SDM dan monitoring pelaksanaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arikunto, S. 2004. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, S. dan Safruddin, A.J. 2010. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bogdan, R. dan Taylor, S.J. 2012. *Prosedur Penelitian*. Dalam Moleong, *Pendekatan Kualitatif*. (hlm. 4). Jakarta: Rineka Cipta.
- Creswell, J. W. 2019. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). London: SAGE Publications.
- Edward III, G.C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Effendi, B. 2002. *Pembangunan Ekonomi Daerah Berkeadilan*. Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta
- Harun, R. dan Ardianto, E. 2011. *Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial: Perspektif Dominan, Kaji Ulang dan Teori Kritis*. Jakarta: Rajawali Press.
- Komigi, I. 2015. *Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat*. Disertasi. Studi Kasus Pada Suku Moi.
- Moleong, L.J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyatiningsih, E. 2011. *Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan*. Yogyakarta: Alfabeta.
- Praratya, A. 2017. *Pengaruh Komunikasi Interpersonal dan Kepemimpinan Lurah terhadap Kinerja Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) Kota Bandung*. Thesis. Bandung: Universitas Pasundan.
- Riyadi. dan Bratakusumah, D.S. 2005. *Peran Masyarakat dalam Pembangunan*. Jakarta: Multigrafika.
- Siagian, S.P. 1994. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gedung Agung.
- Stufflebeam, D.L. and Shinkfield, A.J. 1985. *Systematic evaluation*. Boston: Kluwer Nijhof Publishing.
- Stufflebeam, D. L., & Shinkfield, A. J. 2007. *Evaluation Theory, Models, and Applications*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Widiyaka, dkk. 2013. *Evaluasi Program Sertifikasi Guru dalam Jabatan Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya*. Jurnal Tesis PMIS. Universitas Tanjungpura Pontianak.
- Winarno, B. 2008. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Peraturan:

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206).
- Peraturan Menteri Dalam Neneri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139).
- Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Di Wilayah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 30, Seri D).
- Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Bungursari dan Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 86).
- Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 10).
- Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 40)